

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi pada penelitian ini ingin mengkaji mengenai kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Kudus dengan Muhammadiyah Disaster Management Center(MDMC) Kudus dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Kudus. Covid yang merupakan penyakit baru yang berasal dari Kota Wuhan China, penyakit ini merupakan penyakit menular yang bisa menjangkit siapapun dari yang masih muda sampai tua, oleh sebab itu penyebaran penyakit ini dengan sangat mudah meluas sampai seluruh dunia yang menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat di seluruh dunia menjadi terbatas. Di Indonesia sendiri merespon dengan membuat kebijakan seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar(PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM).

Kudus yang merupakan fokus pada studi kali ini pernah mengalami lonjakan penderita Covid yang cukup signifikan yang membuat kota Kudus menjadi zona merah bahkan di beberapa kecamatan sempat menjadi zona hitam, oleh karena itu MDMC sebagai lembaga berbasis masyarakat dari masyarakat Muhammadiyah untuk penanggulangan bencana turut serta dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kudus untuk ikut serta dalam menangani Covid-19 dengan membentuk satuan yang akan melakukan tugas khusus yaitu Muhammadiyah Covid-19 Commander Canter (MCCC) yang di dalamnya ada struktur pelaksana utama yaitu Majelis Pembina Kesehatan Umat (MPKU).

COVID-19 yang mulai terjadi di akhir 2019 atau awal 2020 merupakan salah satu dari beberapa pandemi yang terjadi sepanjang hidup manusia. Setidaknya telah ada 15 pandemi yang telah tercatat sebelum munculnya COVID-19, Dari berbagai sejarah panjang pandemi yang telah di ketahui dimulai ribuan tahun sebelum abad ke-21, Pandemi telah mulai muncul ketika banyak orang memilih untuk meninggalkan gaya hidup nomaden mereka dan menetap di suatu tempat. Dari sejarah yang telah tercatat pandemi COVID-19 adalah salah satu pandemi terburuk dalam sejarah manusia mengingat luasnya penyebaran, jumlah kasus orang terinfeksi, dan banyaknya

jumlah kematian di berbagai negara.¹ Hal ini juga tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran sebagai berikut:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ

Artinya: “Orang-orang mukmin (bahwa mereka diuji) dicoba (sekali atau dua kali setiap tahun) dengan musim paceklik dan wabah...penyakit (kemudian mereka tidak juga bertobat) dari kemunafikannya (dan tidak pula mengambil pelajaran.” (QS At-Taubah: 126)

Secara umum, pandemi dapat didefinisikan sebagai peristiwa dengan insiden atau tingkat prevalensi yang tinggi, terutama terkait dengan waktu dan distribusi penyebaran yang luas dan cepat. Definisi pandemi sebagai epidemi di seluruh dunia. Selain itu, pandemi biasanya dikaitkan dengan penyebaran penyakit menular secara luas seperti pandemi flu Spanyol, pandemi HIV, dan pandemi Ebola. Selain itu, pandemi dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan luas kejadiannya, yaitu trans-regional (terjadi di satu benua atau antar wilayah), interregional (mencakup dua wilayah atau lebih wilayah), dan global (terjadi di hampir semua/semua wilayah). Penjelasan tentang adanya penyakit yang menjangkit suatu negeri atau wabag juga tertuang dalam (HR Bukhari dan Muslim) sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْحِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ

عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ‘Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Pandemi COVID-19 berkembang begitu pesat sehingga banyak negara belum siap untuk beradaptasi dari kondisi tersebut. Sejak awal, WHO telah memberitahu untuk menangani pandemi ini harus fokus pada aspek kesehatan dengan mengisolasi setiap wilayah di berbagai negara dan melarang kegiatan termasuk keramaian. Namun, untuk

¹ Nurul Aeni, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects”, *Jurnal Litbang*, 17 no 1 (2021): 19.

beberapa negara, anjuran dari WHO tidak diberlakukan dikarenakan mereka tidak mempercayai pandemi COVID-19 akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama.²

Indonesia termasuk menjadi bagian dari negara yang dicap sebagai negara yang lambat merespons pandemi COVID-19. Namun di Asia Tenggara ada juga negara seperti Vietnam dan Singapura, telah melakukan inspeksi besar-besaran dan menerapkan lockdown ketat di setiap wilayah melakukan inspeksi dan mencegah penyebaran COVID-19. Akibatnya, negara-negara ini bisa memantau dan mengontrol arah penularan COVID-19 dan juga negara tersebut mempunyai taraf kematian yang rendah.³

Studi tersebut melihat bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Ini adalah sesuatu yang terjadi di semua tempat yang terkena pandemi, dengan dampak yang bervariasi di setiap tempatnya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat terutama karena pembatasan aktivitas masyarakat, terlebih selama bulan Maret hingga September 2020, sehingga mengakibatkan turunnya kegiatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat terutama yang menegah kebawah.⁴

Dampak dari pandemi COVID-19 kepada sektor ekonomi berbeda di setiap daerah penyebaran. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari struktur ekonomi masing-masing daerah. Yang paling terdampak pandemi adalah daerah-daerah yang didukung perekonomiannya dari sektor industri yang membutuhkan partisipasi dan mobilitas publik yang besar, seperti transportasi, pariwisata, dan perdagangan, yang paling banyak mengalami penurunan akibat terdampak pandemi.⁵

Keluarnya peraturan lockdown dan social distancing adalah jawabannya, sekaligus usaha dari pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Di sisi lain, ini adalah bentuk lain dari proses dehumanisasi, meskipun langkah ini dimaksudkan untuk meminimalkan penyebaran virus dengan efisiensi yang cukup tinggi, tetapi juga berpotensi mendorong orang untuk berpikir bahwa semua

² Janri Jacop Bakarbesy, "Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 no. 9 (2021): 899.

³ Wawan mas'udi, poppy S.Winanti, *New Normal: Perubahan Sosial ekonomi dan politik akibat Covid-19*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 5.

⁴ Fahri dkk, "Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi(Covid-19)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 no 2 (2019): 56.

⁵ Wan Laura Hardilahwati, "Strategi Bertahan UMKM di tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Akutansi dan Ekonomika*, 10 no 1 (2020): 92.

manusia adalah tuan rumah virus itu. Siapa pun dapat tertular virus corona, tetapi itu tidak berarti semua manusia adalah inangnya.⁶

Lamanya identifikasi masyarakat yang positif tertular merupakan indikasi jelas akan kemauan dan siapnya pemerintah dalam menghadapi wabah yang melanda seluruh dunia ini. Sementara itu, kemungkinan lahirnya asumsi yang tidak beralasan akibat kebijakan pemerintah merupakan cerminan dari kualitas intelektual dan kepemimpinannya. Terutama dalam perspektif ekonomi kritis, ini adalah upaya yang mempengaruhi penciptaan monopoli pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh penguasa dan orang-orang di luar dari kemauan yang mereka inginkan, dan mereka merupakan para penguasa pemilik modal, untuk memperlambat perkembangan ekonomi rakyatnya, mendefinisikan basis ekonomi sebagai infrastruktur sosial atas superstruktur sosial, terutama dari perspektif pembangunan budaya sebagai cerminan individu bebas.⁷

Pemerintah harus mampu berperan sebagai tolak ukur informasi yang terpercaya bagi masyarakat dalam keadaan yang tidak pasti seperti masa pandemi ini. Ada empat pilar untuk berkomunikasi tentang COVID-19, antara lain: menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, berkoordinasi dengan otoritas terkait, pemberian akses kepada media informasi, dan membudayakan cuci tangan pakai sabun. Kerja sama berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerja sama merupakan proses sosial yang paling mendasar dan biasanya melibatkan pembagian kerja, dimana masing-masing pihak melakukan semua kegiatan yang akan menjadi tanggung jawabnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.⁸ Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kerjasama dari berbagai aktor. Kolaborasi merupakan bentuk lain dari kerjasama, kerjasama dari berbagai elemen yang terkait dengan orang, lembaga, pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung yang mendapatkan manfaat langsung dari hasil dan manfaat yang

⁶ Bima Jati. Gilang Rizki Aji Putra, "Optimalisasi Pemerintah Dalam mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7 no 5 (2020):8.

⁷ Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), 154.

⁸ Muhammad Taufiq Hatta Wibowo, "Ami Afriyani. Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12 no 1 (2021): 5.

nyata. Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan.

Peristiwa cuaca ekstrem, serangan teroris, dan pandemi. semuanya bisa berbahaya dan menyebabkan banyak kerusakan. Kita perlu mengambil tindakan cepat untuk membantu orang dan menghentikan terjadinya kerusakan mendapat penanganan. Semua lapisan masyarakat setra pemerintah diharapkan ikut serta dalam penanganan covid-19. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua orang selama pandemi Covid-19. Jika ada bencana atau keadaan darurat, pemerintah diharapkan agar bertindak cepat untuk melindungi masyarakat menjamin keamanan dan pelayanan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak mungkin sebuah pemerintah selalu memiliki struktur tepat yang digunakan ketika terjadi bencana besar. Ini membantu untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan setiap orang bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dalam mengatasi COVID-19 adalah hubungan baik antara pemerintah dan swasta atau masyarakat itu sendiri.⁹

Meluasnya penyebaran epidemi Covid-19 membutuhkan upaya kreatif para pemangku kepentingan, terutama para pemimpin daerah.¹⁰ Aktivisme dalam peran aktor non-pemerintah baik secara individu maupun di masyarakat telah menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terkena dampak epidemi Covid-19. Kerja sama sangat dibutuhkan untuk menghadapi pandemi COVID-19, terutama dalam menangani masalah yang muncul.¹¹ Inti dari kerjasama adalah terselenggaranya peran serta aktor eksternal yaitu swasta dan masyarakat, juga terkait pembagian tugas atas keputusan yang diambil.¹²

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Mereka meningkatkan testing, tracking dan treatment, serta memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, ini tidak selalu cukup untuk mencegah penyebaran virus. Untuk mencoba mencegah penyebaran virus lebih lanjut, aktor negara

⁹ Hamjah Banso, Irwan. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Governance and Politics* (JPG), 1 no 2 (2021): 5.

¹⁰ Bayu Nurrohman dkk, "Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19", *Jurnal Komunitas*, 1 no 1 (2021): 6.

¹¹ Yusril Rahmawati dkk. "Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespon Pandemi Covid-19", *Journal of Sosial Development Studies*, 2 no 1 (2021): 43.

¹² Ni Made Dwi Arisanti. I Wayan Suderana, "Penanganan Pandemi Covid-19: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bersama KNPI Gianyar Di Kabupaten Gianyar, Bali", *Jurnal Spirit Publik*, 15 no 2 (2020): 94.

dan non-negara perlu bekerja sama. Ini akan menargetkan lebih banyak orang dan mudah-mudahan mencegah penyebaran Covid-19.¹³ Hal ini tertuang dalam salah satu (HR Bukhari dan Muslim) sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَحْبَبَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ

Artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi‘ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).

Hal ini sejalan dengan narasi bahwa negara tidak dapat sepenuhnya mengatasi bencana sendiri. Artinya ada kekosongan dalam hal penanggulangan bencana yang tidak dapat diisi oleh aktor negara, baik karena wilayah yang terkena bencana sangat besar maupun karena dampak bencana itu sendiri yang sangat tinggi. Aktor negara adalah lembaga pemerintah di berbagai tingkatan, sedangkan aktor non-negara adalah aktor non-pemerintah (*Non-Government Organization/ NGO*) atau lebih di kenal di Indonesia dengan sebutan Ormas yang beroperasi di tingkat lokal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁴

Kerjasama pemerintah dengan Ormas penting dilakukan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Mengingat beberapa Ormas bereaksi cepat terhadap wabah Covid-19. Ormas merespons bencana secara efektif dengan menciptakan jaringan komunikasi dan kerjasama antara Ormas, sektor swasta dan pemerintah daerah. Setiap lembaga

¹³ Aldi Alfari, dkk, “Kontribusi Penanganan Bencana Covid 19 oleh Muhammadiyah Disaster Management Center di Indonesia”, *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8 no 1 (2022):15.

¹⁴ Hari Mulyono, “Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional”, *Jurnal Kajian Lenhanmas RI*, 29 (2017): 22.

swadaya masyarakat mengerahkan sumber dayanya untuk berbagai jenis bantuan, seperti penggalangan dana, donor darah, distribusi logistik, pengiriman relawan untuk mempersiapkan tempat penampungan sementara. Karena gerakan pengurangan risiko bencana masyarakat sipil masih bersifat parsial. Oleh karena itu, upaya konsolidasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat secara simultan merupakan kebutuhan strategis.¹⁵ Muhammadiyah merupakan Ormas dengan kontribusi terbesar. Sebagai organisasi umat beragama terbesar, Muhammadiyah telah mengalokasikan dana sebanyak lebih dari 1 triliun untuk membantu penanganan Covid di Indonesia.

Peran Muhammadiyah dalam menghadapi Covid-19, Muhammadiyah menekankan tiga strategi utama, kesiapan fasilitas medis, implementasi di lapangan dan bimbingan kepada umat tentang keagamaan. Implementasi di daerah ini membutuhkan perhatian dan pengetahuan khusus Strategi akan diambil alih oleh tim dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), satu-satunya tim medis darurat (EMT) yang terdaftar di WHO.¹⁶

Ikut andilnya Ormas dalam membantu persoalan pemerintah tentang persoalan pandemi COVID-19 di Indonesia mempermudah pemerintah untuk mengatasi pandemi. Karena, dengan andilnya Ormas tersebut dapat secara langsung membantu dan mensosialisasikan tentang bahayanya covid dan tak luput juga ikut andil langsung menjadi relawan nekes dan membantu pengurusan pasien terpapar serta menangani penguburan jenazah pasien meninggal sesuai SOP, dengan kerjasama yang di jalin antara pemerintah daerah dan Ormas inilah dapat mempercepat penanganan pasien terpapar ataupun pasien meninggal. Berdasarkan aspek tersebutlah peneliti ingin meneliti kajian politik yang terkandung dalam kerjasama yang telah di jalin dan berdasarkan temuan awal tersebutlah peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dengan MDMC Kudus Dalam Menangani Covid-19 di Kabupaten Kudus: Perspektif Collaborative Governance”**

¹⁵ Nahdiyana Fitri Hiidayah, “Strategi Adaptif NGO saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pelayanan Sosial Mitra Wacana Women Resource Centre)”. *Jurnal Publitias*, 8 no 1 (2021): 68.

¹⁶ Aldi Alfariis dkk, “Kontribusi Penanganan Bencana Covid 19 oleh Muhammadiyah Disaster Management Center di Indonesia”, *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. 8 no 1 (2022): 16.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan permasalahan utama yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Keputusan penekanan penelitian merupakan tahap yang paling penting terhadap penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif tidak diawali dengan sesuatu yang kosong maupun tanpa perkara yang jelas, baik itu merupakan perkara yang bersumber dari pengalaman pribadi dari peneliti atau keputusan ilmiah. Karenanya berdasarkan peneliti kuantitatif yang sebenarnya merupakan inti dari perkara itu sendiri. Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada "Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan MDMC Kabupaten Kudus Dalam Menangani Covid-19 di Kabupaten Kudus."

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menemukan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan MDMC Kudus Sebagai Masyarakat Madani Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana bentuk *Collaborative Governance* antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dengan MDMC Kudus dalam penanganan Covid-19 di Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya guna mengembangkan, menemukan, menelaah kebenaran dari suatu pengetahuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja peranan MDMC sebagai Masyarakat Madani dalam penanganan Covid-19 di Kudus.
2. Mengetahui bagaimana bentuk *Collaborative Governance* yang dijalani oleh Pemda Kudus dengan MDMC cabang Kudus dalam menangani Covid-19 di Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan peneliti mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai kerjasama yang dijalani oleh lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah daerah.
- b. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penelitian bagi peneliti selanjutnya tentang kerjasama lembaga swadaya masyarakat dan pemda.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah serta berbagai pihak yang ikut andil dalam pengambilan keputusan saat kerjasama dilaksanakan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kerjasama yang di jalin oleh lembaga swadaya masyarakat dengan pemda dalam penanganan covid-19 di kudus.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri, berdasarkan 3 bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub-sub bab. Sistematika skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, dafta isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab dua berisi mengenai deskripsi dari teori-teori yang akan dipergunakan dan relevan terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Kerangka teori memaparkan tentang Covid sebagai bencana, *Collaborative Governance* sebagai alternatif kerjasama, dan yang terakhir adalah mengenal Masyarakat Madani. Selain dari teori tersebut bab dua juga berisi hasil dari penelitian terdahulu atau literatur review berupa kajian hasil penelitian jurnal, artikel maupun skripsi yang berkaitan dengan masalah yang ditulis peneliti serta kerangka berfikir.

BAB III :METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga peneliti memaparkan dan mengidentifikasi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti. Setting atau lokasi, waktu penelitian dilaksanakan, dan subjek penelitian sebagai sumber utama data yang diperoleh ketika penelitian berlangsung. Selain dari sumber di atas bab tiga juga menjelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan, metode analisis data, serta pengujian keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian sertapembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah.